### BAB I PENDAHULUAN

* 1. **LATAR BELAKANG**

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja Perangkat Daerah juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal Perangkat Daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

* + 1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal Perangkat Daerah;
    2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
    3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakanrangkaian kegiatanyang simultan dengan penyusunan Perangkat Daerah, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
    4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
    5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

### LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

* + 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagiamana telah diubah dengan UNdang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
    2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
    3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
    5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
    6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
    7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
    8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
    9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
    10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
    13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.
    14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar;

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menjadi komitmen bersama bagi pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

* + 1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
    2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar tugas pokok dan fungsi SKPD.
    3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
    4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
    5. Sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja anggaran.

### SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

# BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

# BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

# BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

* 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  3. Program dan Kegiatan

# BAB IV PENUTUP

### BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA DISKOMINFOSP TAHUN 2022**

* 1. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFOSP**

Evaluasi kinerja merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja kegiatan, dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian kinerja renstra didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renstra dan digunakan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Hal ini penting dalam menyikapi kinerja organisasi ke depan, sehingga keberhasilan yang diraih dapat ditingkatkan dan kegagalan yang terjadi mendapat solusi yang tepat.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas, pokok dan fungsinya menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu :

* + 1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ;
    2. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022;
    3. Menyusun Rencana Kerja SKPD ;
    4. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022;

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditunjang dengan Belanja Operasi Sebesar Rp. 5.822.111.878 (Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.349.667.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

# A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**B. Capaian Analisis Kinerja**.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2022 sebanyak 5 program, dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 56 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut :

Realisasi sebesar Rp.8.152.424.485 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

* + 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.800.000 (delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.800.000 atau 100 %.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 2.975.000 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.975.000 atau 100 %

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.675.000 atau 98,9 %

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.725.000 atau 100 %

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.225.000 (empat juta Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.225.000 atau 100 %

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.875.000 (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.875.000 atau 100 %

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.529.319.000 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.460.792.150 atau 97,29 %.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.395.000 (Delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.395.000 atau 100 %.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.500.000 atau 100 %.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.100.000 (Empat juta seratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.100.000 atau 100 %. -

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.000.000 atau 100 %.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran alokasi sebesar Rp. 1.932.755.000 (Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.926.301.157 atau 99,66 %.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran alokasi sebesar Rp. 250.708.000 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 246.663.800 atau 98,39 %.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.040.000 (enam puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 68.040.000 atau 100%.

- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran Rp. 11.190.000 (sebelas Juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.495.000 atau 58,04.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 197.814.609 atau 98,91 %.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.308.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.23.308.000 atau 100 %.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.224.800 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 21.417.800 atau 96,37 %.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.999.761 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 49.332.731 atau 98,65 %.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143.010.600 (seratus empat puluh tiga juta sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 134.707.400 atau 94,19 %.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.615.000 (empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 41.278.360 atau 99,2 %.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.939.000 (seratus enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 113.962.352 atau 97,45 %.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 39.396.717 (tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 39.396.000 atau 99,99 %.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.843.000 (enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 50.535.600 atau 81,72 %.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.587.000 (tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.573.000 atau 99,99 %.

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Ro.24.176.800 atau 99,9 %.

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran Rp.867.500.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 867.460.000 atau 99,99 %.

- Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.004.000 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 292.988.600 atau 99,99 %.

- Layanan Hubungan Media dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 45.000.000 atau 100 %.

- Kemitraan dengan Pemangku kepentingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.971.800 atau 99,89 %.

1. Program Aplikasi Informatika

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

* Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.329.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 27.329.000 atau 100 %.
* Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 13.900.000 atau 86,88 %.
* Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.449.000 (tiga belas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 11.643.000 atau 86,57 %.
  1. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
* Penatalakasanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.297.000 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 174.220.400 atau 99,39 %.
* Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.504.000 (delapan belas juta lima ratus empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 18.202.800 atau 98,37 %.
* Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 730.000 atau 100 %.
* Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.071.000 (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 154.107.954 atau 99,38 %.
* Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.625.000 (empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 40.448.600 atau 92,81 %.
* Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.737.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 54.537.000 atau 92,85 %.
* Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 765.000 atau 100 %.
* Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.677.400 (enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 68.219.999 atau 99,33 %.
* Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.547.000 (tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 39.510.880 atau 99,91 %.
* Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.124.000 (tiga puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 30.083.000 atau 99,86 %.

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   * + - 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

* Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.586.000 (enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 67.779.494 atau 98,82 %.
* Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.443.000 (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 23.885.000 atau 97,72 %.
* Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.264.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.588.600 atau 70,91 %.
* Peningkatan Kapasitan Kelembagaan Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.233.000 (delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.037.000 atau 99,4 %.
* Pengembangan Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.702.000 (lima puluh tuju juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 57.356.400 atau 99,41 %.
* Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.615.000 (tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 17.057.000 atau 96,83 %.

1. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

* Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.892.600 (empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 14.892.400 atau 99,99%.
* Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.406.700 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 237.406.700 atau 100 %.
* Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.209.000 (tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 36.209.000 atau 100 %.
* Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 227.907.300 (dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 227.784.199 atau 99,95 %.

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.005.000 (seratus delapan juta lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 107.965.900 atau 99,96 %.

TABEL T-C.29.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
| Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 (5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.16 |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |  | 72,31% | 98,02 | 63,03 | 98 | 1,55 | 70,28 | 266,28 | 3,77 |
| 2.16 | 01 |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Capaian Kinerja | 100% | 96,65 | 100 | 98,01 | 0,98 | 100 | 294,66 | 2,9 |
| 2.16 | 01 | 2.01 |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun | 100% | 96,65 | 100 | 99,85 | 0,99 | 100 | 296,5 | 2,9 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3 Dokumen | 0,6 | 3 Dokumen | 11 | 2,2 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 0 | 1 Laporan | 0 | 0 | 1 Laporan | 0 | 0 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 3 Laporan | 2 Laporan | 4 Laporan | 2 | 2 Laporan | 9 | 4,5 |
| 2.16 | 01 | 2.02 |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | 100 % | 100 % | 100 % | 97,31 % | 0,97 | 100 % | 297,31 | 2,9 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang | 35 Orang | 35 Orang | 30 Orang | 0,85 | 35 Orang | 100 | 2,8 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokumen | 1 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1000 Dokumen | 1000 Dokumen | 1000 Dokumen | 1251 Dokumen | 1,251 | 1000 Dokumen | 3251 | 3,21 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokumen | 1 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 5 | 1 Laporan | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokumen | 1 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 0 | 12 Laporan | 12 Laporan | 1 | 12 Laporan | 24 | 2 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 0 | 12 Laporan | 36 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.03 |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 0 | 100 % | 0 | 0 | 100 % | 100 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.03 | 001 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Laporan | 0 | 1 Laporan | 0 | 0 | 1 Laporan | 1 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.05 |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 99,7 | 100 % | 0 | 0 | 100 % | 199,7 | 1,9 |
| 2.16 | 01 | 2.05 | 001 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 35 Orang | 0 | 35 Orang | 0 | 0 | 35 Orang | 35 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.05 | 002 | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan | 1 Orang | 0 | 1 Orang | 0 | 0 | 1 Orang | 1 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.05 | 003 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 1 | 2 Orang | 6 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.05 | 004 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 50 Orang | 0 | 50 Orang | 0 | 0 | 50 Orang | 50 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.05 | 005 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 2 Orang | 0 | 2 Orang | 0 | 0 | 2 Orang | 2 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.06 |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 99,2 | 100 % | 96,87 % | 0,9687 | 100 % | 293,07 | 2,9 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 0 | 1 Paket | 1 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 0 | 1 Paket | 2 | 2 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 0 | 1 Paket | 1 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 004 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 | 1 Paket | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 005 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 25 Dokumen | 23 Dokumen | 25 Dokumen | 73 Dokumen | 2,92 | 25 Dokumen | 121 | 4,84 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 006 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 laporan | 1 Laporan | 1 laporan | 2 laporan | 2 | 1 laporan | 4 | 4 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 007 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 laporan | 200 Laporan | 120 laporan | 250 laporan | 2,083 | 120 laporan | 570 | 4,75 |
| 2.16 | 01 | 2.07 |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah | 1 Paket | 1 paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 | 1 Paket | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.07 | 001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 0 | 1 Unit | 1 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 0 | 1 Unit | 1 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.07 | 003 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 | 1 Paket | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.08 |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 96,4 | 100 % | 95,45 % | 0,954 | 100 % | 291,85 | 2,9 |
| 2.16 | 01 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 | 1 Laporan | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 12 Laporan | 12 | 1 Laporan | 14 | 14 |
| 2.16 | 01 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 1 Laporan | 2 | 2 |
| 2.16 | 01 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 | 1 Laporan | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 001 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | 100 % | 99,9 % | 100 % | 94,37 % | 0.943 | 100 % | 294,27 | 2,9 |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 | 1 Unit | 3 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 1 | 10 Unit | 30 | 3 |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 004 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang dipelihara | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 0 | 1 Unit | 1 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diplihara | 5 Unit | 0 | 5 Unit | 0 | 0 | 5 Unit | 5 | 1 |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 1 Unit | 1 | 1 Unit | 2 | 2 |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 007 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi | 15 unit | 0 | 15 unit | 1 unit | 0,067 | 15 unit | 16 | 1,1 |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 008 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi | 15 unit | 0 | 15 unit | 0 | 0 | 15 unit | 15 | 1 |
| 2.16 | 02 |  |  | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas | 100 % | 99,4 % | 100 % | 100 % | 1 | 100 % | 299,4 | 2,9 |
| 2.16 | 02 | 2.01 |  | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola | 100 % | 99,4 | 100 % | 100 % | 1 | 100 % | 299,4 | 2,9 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 001 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 002 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 2 | 2 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 003 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 004 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 005 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 006 | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 7 Layanan Media | 7 Layanan Media | 7 Layanan Media | 5 Layanan Media | 0,714 | 7 Layanan Media | 19 | 2,7 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 007 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 008 | Manajemen Komunikasi Krisis | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokumen | 1 | 1 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 009 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | 3 Orang | 0 | 3 Orang | 0 | 0 | 3 Orang | 3 | 1 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 010 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokumen | 1 | 1 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 011 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokumen | 1 | 1 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 012 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten | 10 Unit | 0 | 10 Unit | 0 | 0 | 10 Unit | 10 | 1 |
| 2.16 | 03 |  |  | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi | 100 % | 86,2 % | 100 % | 100 % | 1 | 100 % | 282,2 % | 2,82 |
| 2.16 | 03 | 2.01 |  | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah | 100 % | 86,9 % | 100 % | 100 % | 1 | 100 % | 286,9 % | 2,86 |
| 2.16 | 03 | 2.01 | 001 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Domain | 1 Domain | 1 Domain | 1 Domain | 1 | 1 Domain | 3 | 3 |
| 2.16 | 03 | 2.01 | 002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 03 | 2.01 | 003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 | 1 Unit | 3 | 3 |
| 2.16 | 03 | 2.02 |  | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola | 100 % | 86 % | 100 % | 98 % | 0,98 | 100 % | 284 % | 2,84 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 | 1 Unit | 3 | 3 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokumen | 1 | 1 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 34 Perangkat Daerah | 0 | 34 Perangkat Daerah | 0 | 0 | 34 Perangkat Daerah | 34 | 1 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 | 1 Unit | 3 | 3 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 008 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Layanan | 0 | 1 Layanan | 0 | 0 | 1 Layanan | 0 | 0 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan *Masterplan Smart City* | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 011 | Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)* | Jumlah Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)* | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 012 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| **2.20** |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 02 |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 100 % | 99,9 % | 100 % | 94 % | 0,94 | 100 % | 293,9 | 2,93 |
| 2.20 | 02 | 2.01 |  | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | 99,9 % | 100 % | 94 % | 0,94 | 100 % | 293,9 | 2,93 |
| 2.20 | 02 | 2.01 | 001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 3 | 3 |
| 2.20 | 02 | 2.01 | 002 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM Pemerintah yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 64 Orang | 0 | 64 Orang | 21 Orang | 0,33 | 64 Orang | 85 | 1,32 |
| 2.20 | 02 | 2.01 | 003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 2 | 2 |
| 2.20 | 02 | 2.01 | 004 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | 14 Perangkat Daerah | 0 | 14 Perangkat Daerah | 21 Perangkat Daerah | 1,5 | 14 Perangkat Daerah | 35 | 2,5 |
| 2.20 | 02 | 2.01 | 005 | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Statistik | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 0 | 1 Unit | 1 | 1 |
| 2.20 | 02 | 2.01 | 006 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 2 | 2 |
| **2.21** |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | 02 |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | Persentase Keamanan Informasi Pemerintah | **100 %** | **99,9%** | **100 %** | **99,97 %** | 0,9997 | **100 %** | 299,8 % | 2,99 |
| 2.21 | 02 | 2.01 |  | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian | 100 % | 99,9 % | 100 % | 99,97 % | 0,9997 | 100 % | 299,8 % | 2,99 |
| 2.21 | 02 | 2.01 | 001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 2 | 2 |
| 2.21 | 02 | 2.01 | 002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 2 | 2 |
| 2.21 | 02 | 2.01 | 003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 Dokumen | 2 | 2 |
| 2.21 | 02 | 2.01 | 004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 1 | 1 Perangkat Daerah | 3 | 3 |
| 2.21 | 02 | 2.02 |  | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian | 100 % | 100 % | 100 % | 99,96 % | 0,9996 | 100 % | 299,96 % | 2,99 |
| 2.21 | 02 | 2.02 | 001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 1 Perangkat Daerah | 0 | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 1 | 1 Perangkat Daerah | 2 | 2 |

* 1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2022 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan, namun menurut ketentuan bahwa data pencapaian kinerja pelayanan Perangkat daerah tiga tahun dari tahun perencanaan sehingga data n-2.

**TABEL TC-.30.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Sttaistik dan Persandian Tahun 2022**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | SPM | IKK | Target Renstra | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
| Tahun  2022 | Tahun  2023 | Tahun  2024 | Tahun  2025 | Tahun  2022 | Tahun  2023 | Tahun  2024 | Tahun  2025 | Tahun  2023 | Tahun  2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah | - | Nilai SAKIP | CC | CC | B | BB | C | - | - | - | CC | B |  |
| Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | - | - | - | Sesuai | Sesuai |  |
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DiskominfoSP | 70,00% | 72,50% | 75,00% | 80,00% | 75,13 % | - | - | - | 72,50% | 75,00% |  |
| 2. | Digitalisasi Penyelenggaraan Urusan Peemrintahan yang Didesentralisasikan ke Kabupaten | - | Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan digitalisasi pelayanan publik | 30 % | 50 % | 70 % | 90 % | 100 % | - | - | - | 75 % | 100 % |  |
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | - | - | - | 2,6 | 2,8 |  |
| Persentase PPID yang aktif | 50% | 75% | 100% | 100% | 37,83% | - | - | - | 30% | 50% |  |
| Persentase KIM yang aktif | 51,1 % | 68,2 % | 8%,3 % | 100 % | 100 % | - | - | - | 68,2 % | 8%,3 % |  |
| 4. | Meningkatnya Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika Daerah | - | Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi | 70% | 80% | 90% | 100% | 138,5% | - | - | - | 100% | 100% |  |
| 5. | Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral | - | Jumlah data sectoral yang disertai metadata dan didesiminasi | 250 | 280 | 300 | 300 | 235 | - | - | - | 450 | 450 |  |
| Jumlah SDM Pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelanggaraan statistic sectoral | 65 | 65 | 65 | 65 | 21 | - | - | - | 91 | 91 |  |
| Jumlah Infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai data | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 |  |
| 5. | Meningkatnya Layanan Persandian |  | Indeks keamanan pemerintah daerah | Tingkat I | Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | Tingkat II | - | - | - | Tingkat I | Tingkat II |  |
| 6. | Meningkatnya Layanan Telekomunikasi di Desa | - | Persentase desa yang terjangkau sarana telekomunikasi | 80% | 82% | 84% | 86% | 96,96% | - | - | - | 82% | 84% |  |
| Persentase desa yang menggunakan Website Desa | 40% | 60% | 80% | 100% | 9,87% | - | - | - | 60% | 80% |  |

* Untuk indikator Nilai Sakip OPD dan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP belum dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
* Untuk Indikator Laporan Keuangan OPD sesuai SAP belum dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
* Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kominfo SP menunjukkan realisasi 75,13% untuk 3 (tiga) layanan yaitu Ketersediaan Telepon / Internet, Informasi Publik dan Transparansi Publik. Untuk pelayanan ketersediaan Telepon / Internet, Pelayanan Informasi Publik dan Transparansi Publik telah mencapai target karena beberapa daerah telah terjangkau jaringan telekomunikasi.
* Perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan publik Tahun 2022 ditargetkan 30 % atau 11 OPD dan terealiasi 100 % atau 37 (Tiga Puluh Tujuh) OPD. Tercapainya target disebabkan karena pada Bulan Desember Tahun 2022, Semua OPD telah menggunakan Layanan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dengan tujuan untuk mengefisienkan proses administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di samping pada beberapa OPD terdapat Layanan Publik lainnya antara lain: Sekretariat Daerah ( LPSE), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Layanan Perizinan : Simpelnaker, OSS, Si Cantik), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Layanan Kependudukan), Dinas Kesehatan ( Layanan Rujukan) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (SP4N LAPOR).
* Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menunjukkan hasil 1,83 dengan predikat cukup. Menunjukkan target yang ingin dicapai pada tahun 2022 mencapai 91,15%, hal ini didapat dicapai karena beberapa OPD telah menerapkan layanan berbasis elektronik baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Pemerintah Daerah telah Menyusun konsep layanan terintegrasi yaitu Peraturan Bupati tentang Arsitektur SPBE dan telah melalui proses fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 18 Perangkat Daerah yang telah membangun sistem dalam bentuk aplikasi secara mandiri untuk mempermudah layanan.
* Untuk indikator PPID yang aktif ditargetkan 34,1 % (10 PPID) dan terealisasi 10,81 % (4) PPID yaitu PPID Pembantu pada Dinas Kominfo SP, PPID Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Permukiman. Tidak tercapainya target disebabkan karena pelaksanaan PPID di semua Perangkat Daerah belum dilaksanakan secara maksimal.
* Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif ditargetkan 34,1 % (13 KIM) dan terealisasi 100% (13 KIM). Capaian target disebabkan karena jangkauan jaringan telah merata di beberapa tempat sehingga akses informasi telah dapat dilakukan dengan cepat.
* Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi ditargetkan 57 %, dan terealisasi 79 % atau capaian 138,5 %, target tercapai disebabkan karena DiskominfoSP telah melakukan identifikasi ketersediaan signal di semua desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mengetahui kondisi jaringan yang ada disetiap desa. Terdapat 71 Desa dan Kelurahan yang terjangkau jaringan dari 88 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini di dukung dengan Pembangunan Menara telekomunikasi Program 3435 Non 3T Kemkominfo RI di beberapa wilayah yaitu Site Putabangun Kecamatan Bontoharu (Tower Sudah berfungsi), Site Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai (Tower Sudah berfungsi), Site Bontomarannu Kecamatan Bontomanai (Tower Sudah berfungsi), Site Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu (Sementara Proses Pembangunan), Site Lantibongan Kecamatan Bontosikuyu (Sementara Proses Pembangunan), Site Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur (Tower Sudah berfungsi), Site Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu Timur (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), site Labuang pamajang Kecamatan Pasimasunggu ( Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), Site Maminasa Kecamatan Pasimasunggu (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), Site Bonea Kecamatan Pasimarannu (sementara penggalian), Site lambego Kecamatan Pasimarannu (Tower Sudah berfungsi), Site Komba-Komba (towernya sudah terbangun tinggal pemasangan perangkat), Site Pulo Madu, Site garaupa Raya, Site Karumpa dan Site Kalaotoa (tower sudah terbangun, tinggal menunggu pemasangan perangkat), Site Jinato Kecamatan Takabonerate (Towernya sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), Site Tarupa Kecamatan Takabonerate (Tower Sudah berfungsi) dan Site Khusus Pasitallu (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat).
* Jumlah Data Sektoral ( data dari semua OPD) yang disertai Metadata dan diseminasi, ditargetkan 250 data dan terealisasi 235 data atau 94 %. Target belum tercapai 100% disebabkan karena beberapa perangkat daerah belum memiliki metadata, dimana untuk menyusun metadata dilakukan pengumpulan, analisis dan pengolahan data sektoral yang ada di OPD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD yang ada diselayar, dan masih terbatasnya sumber daya pengelola data di tiap perangkat daerah.
* Jumlah SDM Pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistik sektoral, ditargetkan 65 orang dan terealisasi 22 orang atau capaian (33,84 %). Tidak tercapainya target disebabkan karena masih terbatasnya sumber daya manusia (PNS dan PTT Perangkat Daerah) yang telah mengikuti Bimtek/Diklat teknis terkait metadata dan penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh BPS, DiskominfoSP Kabupaten Kepulauan Selayar dan Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan, di samping itu rendahnya capaian target disebabkan karena masih kurangnya motivasi dan dukungan dari perangkat daerah masing-masing dari segi anggaran.
* Jumlah infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai ditargetkan 1 aplikasi dan tidak terealisasi karena anggaran sub kegiatan pengadaan infrastruktur data tahun anggaran 2022 tidak mencukupi, untuk itu dalam tahun 2022 pelaksanaan kegiatan masih sebatas koordinasi dengan pihak terkait untuk pembuatan aplikasi aplikasi/website data statistik sektoral daerah.
* Untuk Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, dari target Tingkat I terealisasi Tingkat II atau Capaian 100 %. Indeks Keamanan Informasi menilai 5 area pengamanan yaitu tata kelola keamanan informasi, pengelolaan resiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan asset informasi dan teknologi dan keamanan informasi. Target dapat tercapai karena telah dilakukannya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di 13 Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kepemdudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD pada tahap identifikasi kerawanan dan resiko sistem elektronik.
* Untuk indikator Persentase Desa yang terjangkau telekomunikasi, ditargetkan 82 % ( 66 desa) dan terealisasi ( 64 desa) atau capaian 96,96 %, belum tercapainya target disebabkan karena Menara telekomunikasi di beberapa wilayah belum berfungsi dengan baik, untuk itu akan dilakukan Kerjasama dan fasiltasi provider atau perusahaan operator seluler untuk membangun tower di desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi
* Desa yang ditargetkan menggunakan Website Desa 40 % ( 32 desa) dan terealisasi 9,87 % ( 8 desa) atau capaian 25 %. Tidak tercapainya target disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan SDM Aparatur Desa dalam hal Teknologi Informasi.

REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 sebesar Rp. 8.152.424.485,- atau terserap 98,35% dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 200.800.000 atau 100 % dari target. Uraian Realisasi Program sebagai berikut :

* + - 1. Penyerapan anggaran per program

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran** | **Realisasi** | **% Terhadap Anggaran** | **Sisa Anggaran** |
| **1.** | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **5.543.918.878,-** | **5.433.554.959,-** | **98,00** | **110.363.919,-** |
| **2.** | **Informasi dan Komunikasi Publik** | **1.263.291.000,-** | **1.263.170.200,-** | **99,99** | **120.800,-** |
| **3.** | **Aplikasi Informatika** | **647.855.400,-** | **633.737.633,-** | **97,82** | **14.117.767,-** |
| **4.** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral** | **209.843.000,-** | **197.703.494,-** | **94,22** | **12.139.506,-** |
| **5.** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** | **624.420.600,-** | **624.258.199,-** | **99,9** | **162.401,-** |

* + - 1. **Penyerapan Anggaran per jenis Belanja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran** | **Realisasi** | **% Terhadap Anggaran** | **Sisa Anggaran** |
| **1.** | **Belanja Pegawai** | **2.529.319.000,-** | **2.460.791.695,-** | **97,29** | **68.527.305,-** |
| **2.** | **Belanja Barang** | **3.513.946.878,-** | **3.452.023.178,-** | **98,24** | **61.923.700,-** |
| **3.** | **Belanja Modal** | **2.246.063.000,-** | **2.239.609.612,-** | **99,71** | **1.981.500,-** |

Dari table tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia (DPA) untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tahun 2022 ini sebesar Rp. 8.289.328.878,- (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Realisasi sampai dengan Desember sebesar Rp. 8.152.424.485,- (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan jika dipersentasekan mencapai 98,35%. Capaian terbesar Program dan kegiatan sudah terealisasi dapat dilihat pada semua Program Kegiatan yaitu, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, meskipun ada hambatan dalam pencapaian target kinerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.

### ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan adalah :

“***Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”***

Adapun rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

**Bandar Maritim** : seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar muat barang serta perdagangan barang, jasa dan industri.

**Kawasan Timur Indonesia** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Mengacu pada Visi tersebut maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Periode 5 (Lima) Tahun RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel

Dan Transparan

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidu Masyarakat

Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

**Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

Pada Misi 1 ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih professional, bermutu dan akuntabel menuju tata Kelola yang baik melalui penyelenggaraan e-Government. Selain telaahn terhadap visi dan misi yang diuraikan di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program kegiatan, sebagai berikut :

* + 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
    3. Program Aplikasi Informatika
    4. Program Penyelenggaraan statistik Sektoral
    5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

**Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan**

Pada misi ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu meningkatkan layanan telekomunikasi desa dalam upaya meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri menghadapi era digitalisasi.

Dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

* + 1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam Portal Satu data Selayar.
    2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.
    3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
    4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online.
    5. Pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman.
    6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
    7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
    8. Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi.
  1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Penjabaran dari rancangan awal rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel V berikut :

**TABEL TC-.31.**

**Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (RP) |  | |
| 1. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** |  | Persentase Capaian Kinerja | 70,28 % | 4.318.735.332 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** |  | Persentase Capaian Kinerja | 70,53 % | 4.318.735.332 |  | |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun | 100 % | 33.500.000 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun | 100 % | 33.500.000 | Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan | |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dok | 7.500.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dok | 7.500.000 |  | |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dok | 4.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dok | 4.000.000 |  | |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dok | 4.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dok | 4.000.000 |  | |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dok | 4.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dok | 4.000.000 |  | |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dok | 4.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dok | 4.000.000 |  | |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 1 Dok | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 1 Dok | 5.000.000 |  | |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dok | 4.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dok | 4.000.000 |  | |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | 100 % | 2.822.048.164 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | 100 % | 2.822.048.164 |  | |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kepulauan Selayar | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang | 2.802.048.164 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kepulauan Selayar | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang | 2.802.048.164 |  | |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dok | 0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dok | 0 |  | |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1000 Laporan | 5.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1000 Laporan | 5.000.000 |  | |
|  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dok | 0 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dok | 0 |  | |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dok | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dok | 5.000.000 |  | |
|  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dok | 0 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dok | 0 |  | |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 5.000.000 |  | |
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Laporan | 5.000.000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Laporan | 5.000.000 |  | |
|  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 0 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 0 |  | |
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Laporan | 0 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Laporan | 0 |  | |
|  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 0 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 0 |  | |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 35 Paket | 150.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 35 Paket | 150.000.000 |  | |
|  | Pemindahan Tugas ASN | Kepulauan Selayar | Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan | 1 Orang | 0 | Pemindahan Tugas ASN | Kepulauan Selayar | Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan | 1 Orang | 0 |  | |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kepulauan Selayar | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 45.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kepulauan Selayar | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 45.000.000 |  | |
|  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kepulauan Selayar | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 50 Orang | 0 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kepulauan Selayar | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 50 Orang | 0 |  | |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kepulauan Selayar | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 2O Orang | 0 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kepulauan Selayar | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 2O Orang | 0 |  | |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 505.537.168 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 505.537.168 |  | |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 |  | |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0 |  | |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 0 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 0 |  | |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 125.210.500 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 125.210.500 |  | |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 25 Dok | 55.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 25 Dok | 55.000.000 |  | |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 25.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 25.000.000 |  | |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 250.326.668 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 250.326.668 |  | |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah | 1 Paket | 0 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah | 1 Paket | 0 |  | |
|  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kepulauan Selayar | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Paket | 0 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kepulauan Selayar | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Paket | 0 |  | |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kepulauan Selayar | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kepulauan Selayar | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 0 |  | |
|  | Pengadaan Mebel | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 0 | Pengadaan Mebel | Kepulauan Selayar | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 0 |  | |
|  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 490.240.000 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Capaian Kinerja | 100 % | 490.240.000 |  | |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 20.240.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 20.240.000 |  | |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 70.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 70.000.000 |  | |
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0 |  | |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 400.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 400.000.000 |  | |
|  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | 100 % | 272.410.000 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kepulauan Selayar | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | 100 % | 272.410.000 |  | |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kepulauan Selayar | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 Unit | 135.810.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kepulauan Selayar | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 Unit | 135.810.000 |  | |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kepulauan Selayar | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya | 10 Unit | 98.600.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kepulauan Selayar | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya | 10 Unit | 98.600.000 |  | |
|  | Pemeliharaan Mebel | Kepulauan Selayar | Jumlah Mebel yang dipelihara | 1 Unit | 0 | Pemeliharaan Mebel | Kepulauan Selayar | Jumlah Mebel yang dipelihara | 1 Unit | 0 |  | |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kepulauan Selayar | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diplihara | 5 Unit | 0 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kepulauan Selayar | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diplihara | 5 Unit | 0 |  | |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kepulauan Selayar | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kepulauan Selayar | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 0 |  | |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kepulauan Selayar | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi | 1 Unit | 38.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kepulauan Selayar | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi | 1 Unit | 38.000.000 |  | |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kepulauan Selayar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kepulauan Selayar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | 0 |  | |
| **2.** | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Kepulauan Selayar | Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas | 100 % | 1.310.000.000 | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Kepulauan Selayar | Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas | 100 % | 1.310.000.000 |  | |
|  | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola | 100 | 1.310.000.000 | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola | 100 | 1.310.000.000 |  | |
|  | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik | 1 Dok | 35.000.000 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik | 1 Dok | 35.000.000 |  | |
|  | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dok | 0 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dok | 0 |  | |
|  | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 1 Dok | 50.000.000 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 1 Dok | 30.000.000 |  | |
|  | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1 Dok | 875.000.000 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1 Dok | 875.000.000 |  | |
|  | Pelayanan Informasi Publik | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 1 Dok | 230.000.000 | Pelayanan Informasi Publik | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 1 Dok | 230.000.000 |  | |
|  | Layanan Hubungan Media | Kepulauan Selayar | Jumlah Layanan Hubungan Media | 7 Layanan | 40.000.000 | Layanan Hubungan Media | Kepulauan Selayar | Jumlah Layanan Hubungan Media | 7 Layanan | 40.000.000 |  | |
|  | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 1 Dok | 50.000.000 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 1 Dok | 50.000.000 |  | |
|  | Manajemen Komunikasi Krisis | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis | 1 Dok | 0 | Manajemen Komunikasi Krisis | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis | 1 Dok | 0 |  | |
|  | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Kepulauan Selayar | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | 3 Orang | 0 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Kepulauan Selayar | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | 3 Orang | 0 |  | |
|  | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 1 Dok | 0 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 1 Dok | 0 |  | |
|  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 1 Dok | 30.000.000 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 1 Dok | 30.000.000 |  | |
|  | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten | 10 Unit | 0 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten | 10 Unit | 0 |  | |
| **3.** | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | Kepulauan Selayar | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi | 100 % | 2.400.000.000 | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | Kepulauan Selayar | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi | 100 % | 2.400.000.000 |  | |
|  | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah | 100 % | 1.050.000.000 | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah | 100 % | 1.050.000.000 |  | |
|  | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Domain | 0 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Domain | 0 |  | |
|  | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | 1 Unit | 50.000.000 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | 1 Unit | 50.000.000 |  | |
|  | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 1 Dok | 1.000.000.000 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 1 Dok | 1.000.000.000 |  | |
|  | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola | 100 % | 1.350.000.000 | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola | 100 % | 1.350.000.000 |  | |
|  | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dok | 150.000.000 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dok | 150.000.000 |  | |
|  | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 Dok | 75.000.000 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 Dok | 75.000.000 |  | |
|  | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 Unit | 150.000.000 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 Unit | 150.000.000 |  | |
|  | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dok | 225.000.000 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dok | 225.000.000 |  | |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | 1 Dok | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | 1 Dok | 0 |  | |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Kepulauan Selayar | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 34 Perangkat Daerah | 50.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Kepulauan Selayar | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 34 Perangkat Daerah | 50.000.000 |  | |
|  | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kepulauan Selayar | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan | 1 Unit | 300.000.000 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kepulauan Selayar | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan | 1 Unit | 300.000.000 |  | |
|  | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Kepulauan Selayar | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Layanan | 0 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Kepulauan Selayar | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Layanan | 0 |  | |
|  | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan *Masterplan Smart City* | 1 Dok | 0 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan *Masterplan Smart City* | 1 Dok | 0 |  | |
|  | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dok | 200.000.000 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dok | 200.000.000 |  | |
|  | Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)* | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)* | 1 Dok | 0 | Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)* | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)* | 1 Dok | 0 |  | |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 1 Dok | 100.000.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 1 Dok | 100.000.000 |  | |
| **4.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Kepulauan Selayar | Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 100 % | 330.000.000 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Kepulauan Selayar | Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 100 % | 330.000.000 |  | |
|  | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | 330.000.000 | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | 330.000.000 |  | |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dok | 105.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dok | 105.000.000 |  | |
|  | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Kepulauan Selayar | Jumlah SDM Pemerintah yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 64 Orang | 50.000.000 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Kepulauan Selayar | Jumlah SDM Pemerintah yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 64 Orang | 50.000.000 |  | |
|  | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Kepulauan Selayar | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dok | 45.000.000 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Kepulauan Selayar | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dok | 45.000.000 |  | |
|  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Kepulauan Selayar | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | 14 OPD | 45.000.000 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Kepulauan Selayar | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | 14 OPD | 45.000.000 |  | |
|  | Pengembangan Infrastruktur | Kepulauan Selayar | Jumlah Infrastruktur Statistik | 1 Unit | 50.000.000 | Pengembangan Infrastruktur | Kepulauan Selayar | Jumlah Infrastruktur Statistik | 1 Unit | 50.000.000 |  | |
|  | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dok | 35.000.000 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Kepulauan Selayar | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dok | 35.000.000 |  | |
| **5.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | Kepulauan Selayar | Persentase Keamanan Informasi Pemerintah | 100 % | 355.000.000 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | Kepulauan Selayar | Persentase Keamanan Informasi Pemerintah | 100 % | 355.000.000 |  | |
|  | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian | 100 % | 295.000.000 | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian | 100 % | 295.000.000 |  | |
|  | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 1 Dok | 35.000.000 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 1 Dok | 35.000.000 |  | |
|  | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 150.000.000 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 150.000.000 |  | |
|  | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 laporan | 60.000.000 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kepulauan Selayar | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 laporan | 60.000.000 |  | |
|  | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 1 Perangkat Daerah | 50.000.000 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 1 Perangkat Daerah | 50.000.000 |  | |
|  | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian | 100 % | 60.000.000 | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kepulauan Selayar | Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian | 100 % | 60.000.000 |  | |
|  | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 1 Perangkat Daerah | 60.000.000 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 1 Perangkat Daerah | 60.000.000 |  | |

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan diperoleh melalui penelitian dan pengamatan lapangan, kunjungan kerja Kepala Daerah, pelaksanaan musrenbang kecamatan/kabupaten serta melalui proses pembahasan Komisi DPRD sebagai wakil rakyat.

Untuk lebih jelasnya, Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel T-C.32 sesuai Format terlampir pada Juknis.

**TABEL TC-.32.**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan/**  **Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Volume** | **Cat.** |
|  |  |  |  |  |  |
| I | Program Aplikasi Informatika |  |  |  |  |
| A | Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |
| 1 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Dusun Tulang, Dusun Polebunging, Dusun Baturapa, Dusun Karajaang, Dusun Bontotinggi, Dusun Bontosaile, Dusun Buki-Buki Utara, Dusun Buki-Buki Selatan, Dusun Lembang Bau, Dusun Dongang-Dongang, Dusun Tombangangia, Pattumbukang, Desa Polassi, | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 13  Buah |  |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOSP**

* 1. **TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan yang ideal harus mempunyai prinsip partisipatif karena masyarakat yang akan memperoleh manfaatnya maka masyarakat juga harus turut serta dalam prosesnya melalui penyelenggaraan musrenbang RPJMD. Sehingga fungsi perencanaan sebagai alat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dapat tercapai.

### TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut meliputi rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran dalam tahun 2024.

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gambaran tentang realitas masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Visi tersebut disusun dengan memperhatikan visi misi Bupati/Wakil Bupati dan arah pembangunan daerah jangka menengah serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,
2. Digitalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke kabupaten,
3. meningkatkan layanan telekomunikasi dan informatika daerah, meningkatkan layanan data statistic sectoral,
4. meningkatkan layanan persandian,
5. meningkatkan layanan telekomunikasi di Desa.

### PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta pencapaian sasaran SKPD, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, mempunyai 5 (Lima) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 54 (Lima Puluh Empat) sub kegiatan.

Untuk lebih jelasnya, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 3.3. sebagai Lampiran (sesuai Format terlampir pada Juknis).

Tabel TC-.3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana  Tahun 2025 | |
| Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.16** |  |  |  | **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan non**  **dasar** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.16** | 01 |  |  | **Urusan Pemerintahan Bidang**  **Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** |  |  | **70,53** | 8.713.735.332 | DAU |  | **71,51** | 8.922.777.843 |
| **2.16** | 01 | 2.01 |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**  **DAERAH** | **Persentase Capaian Kinerja** |  | **100** | **4.318.735.332** | **DAU** |  | **100** | **3.559.456.805** |
| **2.16** | 01 | 2.01 | 001 | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi**  **Kinerja yang tersusun** | **Kepulauan Selayar** | **100** | **33.500.000** | **DAU** |  | **100** | **47.000.000** |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 002 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kepul;auan Selayar | 2 Dok | 7.500.000 | DAU |  | 3 Dok | 10.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kepul;auan Selayar | 1 Dok | 4.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 5.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kepul;auan Selayar | 1 Dok | 4.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 5.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kepul;auan Selayar | 1 Dok | 4.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 5.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kepul;auan Selayar | 1 Dok | 5.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 5.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.01 | 007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kepul;auan Selayar | 3 Dok | 5.000.000 | DAU |  | 3 Dok | 12.000.000 |
| **2.16** | 01 | 2.02 |  | **Administrasi Keuangan** | **Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang**  **tersusun** | **Kepul;auan Selayar** | **100%** | **2.822.048.164** | **DAU** |  | **100** | **2.459.000.000** |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kepul;auan Selayar | 39  Orang | 2.802.048.164 | DAU |  | 39  Orang | 2.420.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kepul;auan Selayar | 1  Laporan | 5.000.000 | DAU |  | 1  Laporan | 5.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kepul;auan Selayar | 12  Laporan | 5.000.000 | DAU |  | 12  Laporan | 5.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kepul;auan Selayar | 12  Laporan | 5.000.000 | DAU |  | 12  Laporan | 6.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.02 | 008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kepul;auan Selayar | 12 Dok | 5.000.000 | DAU |  | 12 Dok | 7.000.000 |
| **2.16** | 01 | 2.05 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja | Kepul;auan Selayar | 100 | 195.000.000 | **DAU** |  | 100 | 140.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.05 | 001 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kepul;auan Selayar | 1 paket | 150.000.000 | DAU |  | 1 Paket | 50.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.05 | 003 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Kepul;auan Selayar | 2 ASN | 45.000.000 | DAU |  | 2 ASN | 50.000.000 |
| **2.16** | 01 | 2.06 |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  | Kepul;auan Selayar | 100 | 505.537.168 | **DAU** |  | 100 | 383.456.805 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kepul;auan Selayar | 1 paket | 50.000.000 | DAU |  | 1 paket | 35.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 004 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kepul;auan Selayar | 1 paket | 152.210.500 | DAU |  | 1 paket | 30.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 005 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Kepul;auan Selayar | 25 Dok | 55.000.000 | DAU |  | 25 Dok | 20.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 006 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kepul;auan Selayar | 1 Laporan | 25.000.000 | DAU |  | 1 Laporan | 20.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.06 | 007 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kepul;auan Selayar | 120 Laporan | 250.326.668 | DAU |  | 120 Laporan | 238.456.805 |
| **2.16** | 01 | 2.08 |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Capaian Kinerja** | Kepul;auan Selayar | **100%** | **236.540.161** | **DAU** |  | **100%** | **335.000.000** |
| 2.16 | 01 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kepul;auan Selayar | 1 Laporan | 20.240.000 | DAU |  | 1 Laporan | 35.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan | Kepul;auan Selayar | 1 Laporan | 70.000.000 | DAU |  | 1 Laporan | 35.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kepul;auan Selayar | 1 Laporan | 400.000.000 | DAU |  | 1 Laporan | 238.000.000 |
| **2.16** | 01 | 2.09 |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik** | Kepul;auan Selayar | **100%** | 272.410.000 | DAU |  | **100%** | **180.000.000** |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Kepul;auan Selayar | 1 Unit | 135.810.000 | DAU |  | 1 Unit | 35.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya | Kepul;auan Selayar | 10 Unit | 98.600.000 | DAU |  | 10 Unit | 25.000.000 |
| 2.16 | 01 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi | Kepul;auan Selayar | 1 Unit | 38.000.000 | DAU |  | 1 Unit | 15.000.000 |
| 2.16 | 02 |  |  | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas** | Kepul;auan Selayar | **100** | 1.310.000.000 | **DAU** |  | **100** | **1.064.189.538** |
| **2.16** | 02 | 2.01 |  | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola** | Kepul;auan Selayar | **100** | 1.310.000.000 | **DAU** |  | **100** | **1.064.189.538** |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 001 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 35.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 32.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 003 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 50.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 36.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 004 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 875.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 510.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 005 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 230.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 245.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 006 | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | Kepulauan Selayar | 7 Layanan | 40.000.000 | DAU |  | 7 Layanan | 35.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 007 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 50.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 35.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 011 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 30.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 26.000.000 |
| **2.16** | 03 |  |  | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi** | Kepulauan Selayar | **100** | 2.400.000.000 | **DAU** |  | **100** | **3.327.000.000** |
| **2.16** | 03 | 2.01 |  | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah** | Kepulauan Selayar | **100** | 1.050.000.000 | **DAU** |  | **100** | **657.000.000** |
| 2.16 | 03 | 2.01 | 002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 50.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 247.000.000 |
| 2.16 | 03 | 2.01 | 003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | I Unit | 1.000.000.000 | DAU |  | I Unit | 410.000.000 |
| **2.16** | 03 | 2.02 |  | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola** | Kepulauan Selayar | **100** | 1.350.000.000 | **DAU** |  | **100** | **2.670.000.000** |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 150.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 180.000.000 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 75.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 135.000.000 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | Kepulauan Selayar | 1 web | 150.000.000 | DAU |  | 1 web | 180.000.000 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 225.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 220.000.000 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Kepulauan Selayar | 10 OPD | 50.000.000 | DAU |  | 10 OPD | 230.000.000 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 006 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan | Kepulauan Selayar | 1 Unit | 300.000.000 | DAU |  | 1 Unit | 330.000.000 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 007 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 0 | DAU |  | 1 Dok | 280.000.000 |
| 2.16 | 2.02 | 010 | 2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 200.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 235.000.000 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 011 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 0 | DAU |  | 1 Dok | 235.000.000 |
| 2.16 | 03 | 2.02 | 012 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 100.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 255.000.000 |
| 2.16 |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** |  | Kepulauan Selayar | **100** | 330.000.000 | DAU |  | **100** | 365.297.562 |
| **2.16** | 02 |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia** | Kepulauan Selayar | **100** | 330.000.000 | **DAU** |  | **100** | **365.297.562** |
| **2.16** | 02 | 2.01 |  | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Kepulauan Selayar** | **100** | 330.000.000 | **DAU** |  | **100** | **365.297.562** |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 105.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 140.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 002 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM Pemerintah yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Kepulauan Selayar | 64 orang | 50.000.000 | DAU |  | 36 orang | 60.000.000 |
|  | 02 | 2.01 | 003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 45.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 35.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 004 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | Kepulauan Selayar | 14 OPD | 45.000.000 | DAU |  | 14 OPD | 40.297.562 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 005 | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Statistik | Kepulauan Selayar | 1 Unit | 50.000.000 | DAU |  | 1 Unit | 50.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 006 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 35.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 40.000.000 |
| 2.16 |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **Persentase Keamanan Informasi Pemerintah** | Kepulauan Selayar | **100** | 355.000.000 | DAU |  | **100** | 366.112.466 |
| 2.16 | 02 |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian** | Kepulauan Selayar | **100** | 295.000.000 | **DAU** |  | **100** | **321.112.766** |
| 2.16 | 02 | 2.01 |  | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Kepulauan Selayar | 1 Dok | 35.000.000 | DAU |  | 1 Dok | 45.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 001 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepulauan Selayar | 1 Laporan | 150.000.000 | DAU |  | 1 Laporan | 58.000.000 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 002 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kepulauan Selayar | 1 Laporan | 60.000.000 | DAU |  | 1 Laporan | 158.112.766 |
| 2.16 | 02 | 2.01 | 003 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | Kepulauan Selayar | 1 OPD | 50.000.000 | DAU |  | 1 OPD | 60.000.000 |
| **2.16** | 02 | 2.01 | 004 | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian** | Kepulauan Selayar | **100** | 60.000.000 | **DAU** |  | **100** | **45.000.000** |
| 2.16 | 02 | 2.02 |  | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | Kepulauan Selayar | 1 OPD | 60.000.000 | DAU |  | 1 OPD | 45.000.000 |

### BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOSP**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program DISKOMINFOSP Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas-aktivitas yang terukur bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan.

Program dimaksud hanya program lokalitas kewenangan DISKOMINFOSP Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penataan kepegawaian dan pelayanan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISKOMINFOSP Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada setiap urusan pemerintahan, meningkatkan penyebarluasan informasi public yang berkulaifikasi.

1. Program Aplikasi Informatika

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dan informatika daerah dan meningkatkan sarana telekomunikasi.

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini dimaksudkan dalam rangka tersedianya data yang akuntabel dan dapat berbagai pakai, sehingga dapat dimanfaatkan dalam Menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini dimaksudkan untuk mengoptimalisasikan Layanan keamanan informasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pendanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 membutuhkan dana/pagu indikatif sebanyak Rp.8.713.735.332,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum.

**BAB V PENUTUP**

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah;
3. Pengembangan implementasi e-government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Pengembangan penyediaan layanan infirmasi website online;
5. Pengembangan Jaringan komunikasi data yang aman;
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
7. Ketersediaan layanan informasi public yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
8. Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi.

60

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024. Semoga Renja ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2024.

Benteng, 14 Maret 2023 KEPALA DINAS,

**Drs. AHMAD YANI.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670312 199203 1 004

61

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL………………………………………………………………………….i

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………..ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………iv

BAB I : PENDAHULUAN……………………………………………………………….1

* 1. LATAR BELAKANG……………………………………………………...1
  2. LANDASAN HUKUM…………………………………………………….3
  3. MAKSUD DAN TUJUAN………………………………………………...6
  4. SISTEMATIKA PENULISAN……………………………………………7

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOSP TAHUN

2022……………………………………………………………………………..8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOSP TAHUN

2022……………………………………………………………………….8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISKOMINFOSP……………...27

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

DISKOMINFOSP……………………………………………………….35

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD………………..37

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT…………………………………………………………47

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOSP………………………………48

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL………………...48

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOMINFOSP………………48

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………………………49

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOSP………………58

BAB V : PENUTUP……………………………………………………………………..60

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kemudian dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Amin !

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 14 Maret 2023

KEPALA DINAS,

**Drs. AHMAD YANI.**

Pangkat : Pembina Utama muda

NIP. 19670312 19920312 1 004